

PEDOMAN - MUSRENBANGDA

2025

PERWAKO NO. 5, BD. 2025/NO. 1575, 25 HLM

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK - Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam yang efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Wali Kota dan hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Wali Kota;

- Bahwa Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tidak sesuai lagi dengan dinamika kebijakan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda no. 2 Tahun 2006; Perda No. 7 Tahun 2021; Perda No. 6 Tahun 2024;

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup dan kedudukan, tujuan dan tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kelurahan, tujuan dan tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, tujuan dan tata cara pelaksanaan forum perangkat daerah, tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kota, pokok-pokok pikiran DPRD dan tata cara penyampaian Pokir DPRD;

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Januari 2025

- Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 200 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : -